

Strategi Pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA Menggunakan *Interpretative Structural Modelling* (Studi Kasus: Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka dan Kota Cirebon)

Eko Fajar Setiawan¹, Tengku Munawar Chalil²

¹ Institut Teknologi Bandung and 24021021@mahasiswa.itb.ac.id

² Institut Teknologi Bandung and tengkumunawarchalil@gmail.com

ABSTRAK

Pengembangan kawasan Metropolitan REBANA (Cirebon- Patimban dan Subang) melibatkan berbagai aktor kepentingan dari kab/kota, propinsi dan pemerintah pusat. Masifnya keterlibatan lembaga, seringkali membawa kepentingan sektoral sehingga keterpaduan pembangunan sulit tercapai. Untuk menghadirkan keterpaduan fungsi/ peran kewenangan dari masing-masing kelembagaan, penelitian ini akan mengkaji komponen-komponen indikator pembangunan yang berpengaruh terhadap pengembangan kawasan Metropolitan. Penelitian ini menggunakan pendekatan masukan pakar/ ahli pembangunan/ praktisi (*expert judgemental*) yang diolah menjadi komponen indikator pembangunan kawasan dan pengambilan kuesioner tertutup kepada aktor/ kelembagaan terlibat. Analisis kuantitatif menggunakan simulasi aktor *Interpretative Structural Modelling* (ISM) untuk mengidentifikasi aktor kunci pengembangan kawasan, dan pemeringkatan aktor/ kelembagaan kawasan. Harapannya, menghadirkan bentuk-bentuk strategi pengembangan kawasan dengan lokasi fokus di wilayah (Kabupaten/ Kota) sekitar kawasan Penyangga (khususnya Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka dan Kota Cirebon).

Kata Kunci: Metropolitan REBANA, Keterpaduan, *expert judgemental*, ISM, pengembangan kawasan

ABSTRACT

The development of the REBANA Metropolitan area (Cirebon-Patimban and Subang) involves various interested actors from districts/cities, provinces and the central government. The massive involvement of institutions often brings sectoral interests so that integrated development is difficult to achieve. In order to present the integrated function/role of authority of each institution, this study will examine the components of development indicators that influence the development of the Metropolitan area. This study used an expert/development expert/practitioner input approach (*expert judgment*) which was processed into regional development indicator components and closed questionnaires to the actors/institutions involved. Quantitative analysis uses Interpretative Structural Modeling (ISM) actor simulations to identify key regional development actors, and rank regional actors/institutions. The hope is to present regional development strategies with a focus on areas (districts/cities) around the Buffer area (particularly Cirebon Regency, Majalengka Regency and Cirebon City).

Keywords: REBANA Metropolitan, Integration, *expert judgment*, ISM, regional development

PENDAHULUAN

Pembangunan kawasan metropolitan sebagai kawasan strategis nasional (KSN) memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dengan harapan menciptakan *trickle down effect* dan keterpaduan infrastruktur bagi kawasan penyangga di sekitarnya (Kustiawan, 2009). Salah satu kawasan metropolitan yang didorong oleh pemerintah pusat melalui Perpres 87 Tahun 2021 adalah Kawasan Metropolitan Baru Rebana (Cirebon- Patimban dan Subang). Melalui Perpres 87 Tahun 2021, Kawasan Rebana ini didesain sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) untuk mengurangi beban Metropolitan Bandung Raya. Beberapa kabupaten yang masuk dalam kawasan ini adalah Wilayah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Subang, Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten

Sumedang, dan Kabupaten Kuningan dengan didukung oleh *feeder/ hub transportation* dari Bandara Kertajati dan dukungan tol Cisumdawu.

Sesuai dengan perpres 87/2021, kawasan Rebana ini akan memiliki pusat pengembangan bisnis Bernama Kertajati Aerocities, dimana arah pengembangan kawasan bertema *central business district* (CBD) seluas 3.480 ha. Untuk mencapai keterpaduan dan efek *multiplier* di sekitar kawasan penyangga, diperlukan tata kelola kolaboratif dalam pengembangan kawasan Metropolitan REBANA. Melalui amanat perpres, fungsi dan kewenangan Gubernur didelegasikan kepada Badan Pengelola Kawasan Metropolitan REBANA pada Pergub 84 Tahun 2020. Fungsi dari badan ini menjadi fasilitator/ mediator atau perwakilan Gubernur untuk hadir menjembatani kepentingan daerah (kabupaten), propinsi dengan pemerintah pusat yang masing-masing membawa kepentingan sektoral.

Untuk menghadirkan keterpaduan fungsi/ peran kewenangan dari masing-masing kelembagaan, penelitian ini akan mengkaji komponen-komponen indikator pembangunan kawasan yang berpengaruh terhadap pengembangan kawasan Metropolitan berdasarkan masukan pakar/ ahli pembangunan/ praktisi. Harapannya, menghadirkan bentuk-bentuk strategi pengembangan kawasan/ *roadmap* program dengan lokus wilayah (Kabupaten/ Kota) di sekitar kawasan Penyangga (khususnya Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka dan Kota Cirebon).

LANDASAN TEORI

A. Simulasi Aktor ISM (*Intepretative Structural Modelling*)

Interpretative Structural Modeling (ISM) adalah pemodelan yang dikembangkan untuk mengidentifikasi atau menyimpulkan kompleksitas hubungan antar faktor dalam permasalahan atau isu tertentu dari jejaring aktor (Marimin, 2004). Pertama kali yang dilakukan, adalah diskusi dengan para pakar (*brainstorming*) atau *expert judgmental* untuk menjaring parameter dasar model pengembangan jejaring aktor di kawasan Rebana. Dari diskusi para pakar, diperoleh beberapa ide atau variabel menggunakan ISM. Langkah-langkah ISM yakni merancang *Structural Self Interaction Matrix* (SSIM), mencari *reachability matrix* (RM), mencari Canonical Matrix (CM), dan menentukan level aktor dari proses iterasi antar aktor. SSIM dicari untuk menemukan hubungan kontekstual antar variabel i dengan variabel j. RM ditentukan dari pengukuran komponen menggunakan alat V,A,X,O dengan binomial (angka 1/ angka 0). CM dihitung untuk menemukan level aktor sehingga didapatkan model simulasi aktor berdasarkan iterasi tertentu.

Dari model tersebut kemudian akan dibuat suatu *road map* pengembangan kawasan berbasis kepentingan aktor lembaga di Kawasan Metropolitan REBANA. Beberapa aktor (kelembagaan) yang sangat terkait dengan relevansi pembangunan kawasan REBANA di antaranya 1) PT BIJB Jawa Barat, 2) Kementerian Perhubungan RI, 3) Kementerian Perindustrian, 4) Kementerian Pariwisata, 5) Gubernur Jawa Barat, 6) PT Angkasa Pura II, 7) Perbankan, 8) BKPM RI, 9) Pemerintah Kabupaten (Kab. Cirebon, Majalengka, Kab. Sumedang, Subang, Kuningan dan Kota Cirebon), 10) Travel Agency dan UMKM/ Asosiasi BUMDes (Kab. Cirebon, Majalengka, Kab. Sumedang, Subang, Kuningan dan Kota Cirebon)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran antara analisis kuantitatif ISM dan analisis kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan sejak September 2022 s.d. Desember 2022 dengan mengambil studi kasus di Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon. Terpilihnya tiga (3) Kabupaten itu didasarkan pada pertumbuhan ekonomi wilayah makro (PDRB) tahun 2022 yang berada diatas 5,7% diatas Propinsi Jawa Barat, paling tinggi dari keenam wilayah REBANA adalah Kota Cirebon sekitar 6,3%. Namun demikian, tingginya pertumbuhan ekonomi wilayah itu juga disertakan masalah kemiskinan ekstrem di kedua wilayah studi, yakni di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Cirebon. Tahapan penelitian yakni melalui kajian literatur, wawancara mendalam, pengambilan kuesioner, pengolahan data dan analisis serta penarikan kesimpulan.

Kajian literatur digunakan untuk menentukan komponen-komponen peran dan kewenangan aktor terhadap pengembangan kawasan di sekitar Metropolitan REBANA. Pada penelitian ini termuat empat puluh lima (45) komponen variabel independen (x) terhadap keberlanjutan pembangunan kawasan Metropolitan REBANA sebagai variabel dependen (y). Hasil identifikasi terdapat 10 aktor berpengaruh. Beberapa komponen tersebut yakni a) ketersediaan infrastruktur pendukung dan penunjang, b) Optimalisasi Faktor Produksi di sekitar kawasan, c) Regulasi dan dukungan kelembagaan, d) Kerjasama dan akses pasar (*global supply-chain*), e) Insentif dan kemudahan berusaha, f) Pertimbangan Indeks Pembangunan Manusia , g) Pertimbangan ekonomi wilayah, h) limitasi faktor kualitas lingkungan hidup.

Penelitian ini melibatkan *expert judgement* dari kalangan akademisi/ praktisi/ dan asosiasi, dengan total sepuluh (10) orang dengan latar akademisi dari ITB (2 orang), 2 orang tenaga ahli/ Birokrat (Bappeda Jabar, BKPM), 2 orang dari praktisi bisnis dari kalangan HIPMI Jawa Barat (1 orang), ASITA Jawa Barat (1 orang), 4 orang dari Pelaku (BUMDes/ Industri Menengah/ KADIN) berlokasi di Jawa Barat. Sepuluh orang tersebut, awalnya diinterview tentang keberjalanan program pembangunan Kawasan REBANA dan selanjutnya, 10 aktor itu diminta untuk menilai hubungan komponen indikator pembangunan antar aktor kelembagaan melalui perangkat kuesioner ISM, dengan menilai komponen aktor menggunakan jawaban V-A-X-O. Empat kategori jawaban, mewakili arah hubungan antara satu set komponen (i dan j) menurut Faisal (2014) menyatakan:

- a) V mengindikasikan bahwa komponen aktor i mempengaruhi kesiapan aktor (j);
- b) A mengindikasikan bahwa komponen aktor j mempengaruhi kesiapan aktor (j)
- c) X mengindikasikan bahwa komponen/ aktor i mempengaruhi kesiapan aktor (j) dan sebaliknya kesiapan aktor (j) mempengaruhi komponen i, atau dengan arti lain terdapat hubungan saling mempengaruhi antara aktor i dan j;
- d) O mengindikasikan bahwa aktor i dan j tidak saling berhubungan

Setelah melakukan penilaian V-A-X-O pada kuesioner, selanjutnya pengolahan data kuesioner dilakukan melalui Excel untuk kemudian dikonversi dengan nilai binomial (0/1) pada jawaban V-A-X-O. Melalui bantuan aplikasi yang dikembangkan oleh https://statistikawanku.shinyapps.io/ism_software/ data analisis, akan berbentuk *SSIM*, dan *Reachibility matrix*, *micmac quadrant*, dan *graph level actor*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Structural Self- Interaction Matrix (SSIM)

Langkah pertama yang dilakukan setelah mendapat penilaian judgement dari pakar, selanjutnya mengolah data V-A-X-O melalui bantuan aplikasi ISM. Penjelasan tentang V-A-X-O menghasilkan tabel 2 berikut ini.

Dalam analisis SSIM ini, aktor (i) menjelaskan bahwa aktor (i) dari kiri ke kanan/ sumbu *horizontal*. Semakin ke kanan, mencirikan kewenangan untuk mengembangkan kawasan semakin dekat dan relevan dengan fungsi/ perannya sebagai aktor kelembagaan. Sementara aktor (j) menjelaskan bahwa aktor (j) dari bawah ke atas/ sumbu vertikal. Semakin ke bawah, semakin ke atas, semakin alokasi anggaran yang dibutuhkan semakin besar untuk membiayai pengembangan kawasan secara langsung. Gubernur mendapat porsi alokasi anggaran, dikarenakan Gubernur bersifat fasilitator dalam pengembangan kawasan strategis nasional namun peran/ fungsinya cukup berpengaruh (paling kanan) untuk mengkoordinasikan pembangunan antar kawasan (kab) di sekitar Kawasan REBANA. Kemudian fungsi peran Gubernur itu didelegasikan kepada Badan Pengelola Kawasan REBANA.

Tabel 1. *Structural Self- Interaction Matrix*

Aktor	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10
	BIJB	Kemenperin	Kemenhub	Kemenpar	PT AP 2	Perbankan	BKPM	Pemkab	Travel/UMKM	Gubernur
BIJB	O	V	X	V	X	V	X	X	X	A
Kemenperin		A	V	V	V	V	V	V	V	V
Kemenhub			V	V	V	V	O	O	X	
Kemenpar				V	V	V	V	O	X	
PT AP 2					X	V	V	A	A	
Perbankan						A	A	V	X	
BKPM							V	V	X	
Pemkab								X	V	
Travel/UMKM										V
Gubernur										

Sumber : Hasil analisis (2023)

Berdasarkan hasil analisis Tabel 1 didapat interaksi antar aktor- kelembagaan pengembang Kawasan REBANA yakni sebagai berikut.

- 1) Aktor/ Kelembagaan Kawasan yang memberikan pengaruh kepada pihak lain (V) dalam bentuk pendelegasian kewenangan / fungsi lembaga (insentif) kepada pihak lain untuk lebih mandiri. Dalam hal ini ada a) Kemenhub dengan BIJB, b) Kemenpar- dengan Kemenperin dan Kemenhub, c) PT Angkasa Pura (AP) 2 dengan BIJB/Kemenperin/Kemenhub/Kemenpar, d) Perbankan dengan Kemenperin/Kemenhub/Kemenpar, e) BKPM dengan BIJB/ Kemenperin/ Kemenhub/Kemenpar/PT AP2, f) Pemkab dengan Kemenperin/Kemenpar/PT AP 2/ BKPM, g) Travel, UMKM/BUMDes dengan Kemenperin/Perbankan/BKPM dan h) Gubernur dengan Kemenperin/ Pemkab. Artinya interaksi antar aktor tersebut, melahirkan

ketergantungan di salah satu pihak, pihak yang diuntungkan adalah pihak yang memiliki akses sumber daya yang lebih banyak.

- 2) Aktor/ Kelembagaan Kawasan yang memberikan pengaruh kepada pihak lain (A) dalam bentuk pengalokasian sumber daya (keuangan) atau kewenangan akan mempengaruhi pihak lain untuk lebih mandiri. Dalam hal ini ada a) Kemenhub dengan Kemenperin, b) BKPM dengan perbankan, c) Pemkab dengan perbankan, d) Asosiasi Travel/ UMKM/ BUMDes dengan PT AP 2, e) Gubernur dengan BIJB dan f) Gubernur dengan PT AP 2
- 3) Aktor/ Kelembagaan Kawasan yang memberikan pengaruh (X) antar kedua pihak melalui pendelegasian kewenangan atau pengalokasian sumber daya terhadap keberlanjutan pengembangan Kawasan REBANA adalah a) Kemenpar- BIJB, b) Perbankan- BIJB, c) PT Angka Pura II- Perbankan, d) Pemerintah Kabupaten- BIJB, e) Asosiasi Travel/ UMKM/ BUMdes- BIJB, f) Gubernur- Kemenhub, g) Gubernur- BKPM dan h) Gubernur- Pemerintah Kabupaten
- 4) Aktor Kelembagaan Kawasan yang belum memberikan pengaruh (O) terhadap keberlanjutan pengembangan Kawasan REBANA adalah a) Kemenperin- BIJB, b) Pemkab- Kemenhub, c) Asosiasi Travel/ UMKM/ BUMDes- Kemenhub dan Kemenpar

Reachibility Matrix

Setelah mendapatkan tabel SSIM, kemudian diolah *Reachibility matrix* menggunakan proses dua langkah. Pada langkah pertama, abjad yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antarkomponen dalam SSIM diganti dengan “0” atau “1”. Nilai dalam *reachibility matrix* sebagai berikut.

Tabel 2. Final Matrix

Aktor	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	Driving Power
	BIJB	Kemenperin	Kemenhub	Kemenpar	PT AP 2	Perbankan	BKPM	Pemkab	Travel/UMKM	Gubernur	
BIJB	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9
Kemenperin	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	8
Kemenhub	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
Kemenpar	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8
PT AP 2	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6
Perbankan	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	5
BKPM	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	5
Pemkab	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	5
Travel/UMKM	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	5
Gubernur	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	7
Dependence Power	6	2	3	5	8	9	7	8	9	10	

Sumber : Hasil analisis (2023)

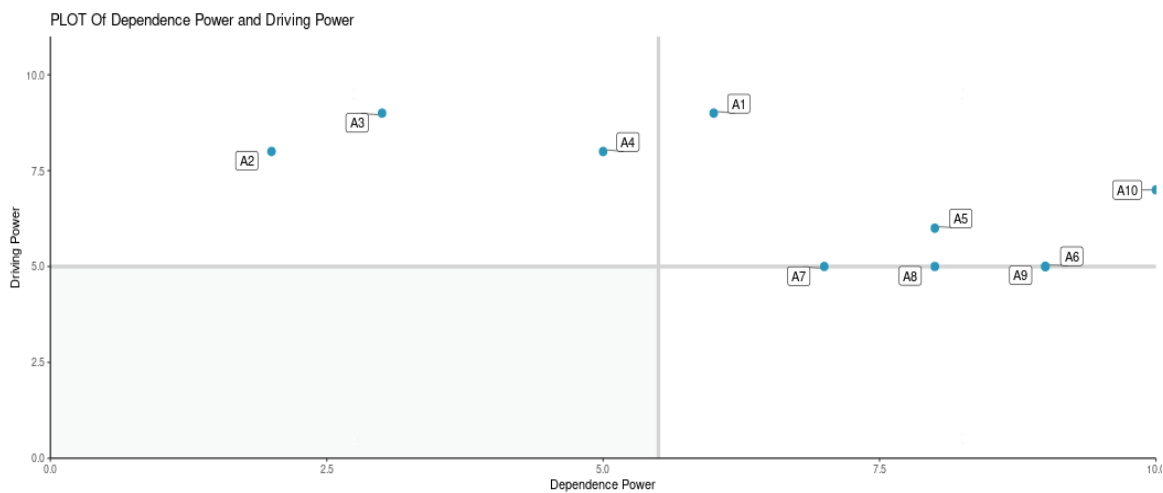
Berdasarkan analisis Tabel 2 diatas, aktor kelembagaan yang memiliki ketergantungan paling tinggi terhadap interaksi antar aktor kelembagaan adalah Gubernur dan aktor kelembagaan yang paling memberikan kontribusi terhadap pengembangan Kawasan REBANA adalah PT BIJB.

Analisis Quadrant Mic Mac

Untuk memudahkan, proses *scanning*, hubungan antar aktor kelembagaan kawasan REBANA dipetakan melalui analisis Mic Mac sehingga dapat dikaji ‘*driving power*’ dan ‘*dependence power*’ masing-masing aktor. Dalam penelitian ini melalui pendekatan *kuadran mic-mac*, nilai nilai itu berasal dari angka *reachability matrix* pada tabel 2 diatas. Nilai *dependence power* aktor yang kecil akan berada paling bawah dari diagram sementara nilai *driving power* yang besar, akan meletakkan aktor berada paling kanan diagram. Berikut ini ketentuan dari analisis mic mac yang perlu diperhatikan. Sage (1977) mengklasifikasikan kuadran mic mac sebagai berikut.

- 1) Variabel *Autonomous* (Kuadran I) bermakna bahwa aktor- aktor ini tidak memiliki pengaruh dan kurang memiliki kemandirian. Dalam penelitian ini, tidak teridentifikasi aktor tersebut
- 2) Variabel *Dependent* (Kuadran II) bermakna bahwa aktor ini memiliki kekuatan pengaruh yang lemah namun memiliki kemandirian. Dalam penelitian ini, tidak teridentifikasi aktor tersebut
- 3) Variabel *Linkage* (Kuadran III) bermakna bermakna bahwa aktor ini memiliki daya pengaruh tinggi, dan kemandirian yang tinggi. Dalam penelitian ini, tujuh (7) aktor masuk dalam kuadran III, diantaranya BIJB, PT AP 2, Perbankan, BKPM, Pemkab, Travel agency/ Asosiasi UMKM, Gubernur
- 4) Variabel *Independent* (Kuadran IV) bermakna bahwa aktor memiliki daya pengaruh yang tinggi namun memiliki kemandirian yang lemah. Mereka mewakili Kuadran IV. Dalam penelitian ini, ada tiga (3) aktor yang memiliki kemandirian diantaranya Kemenhub, Kemenpar, dan Kemenperin

Berikut ini, gambar *stakeholder mapping* menggunakan diagram mic mac, sebagai berikut.



Gambar 1. Diagram Analisis MicMac

Sumber : Hasil analisis (2023)

Berdasarkan gambar 1 diatas, aktor kelembagaan yang memiliki ketergantungan paling tinggi terhadap kelembagaan lain adalah Gubernur, yang saat ini perannya sudah didelegasikan kepada Badan Pengelola Kawasan REBANA dan aktor kelembagaan yang paling memberikan kontribusi terhadap pengembangan Kawasan REBANA adalah PT BIJB. Visualisasi ini tidak begitu mengubah hasil analisis pada tabel 2 sebelumnya.

Pemeringkatan Aktor (Actor Levelling)

Dari hasil analisis tabel 1 dan tabel 2, kemudian disimpulkan pemeringkatan aktor kelembagaan Kawasan REBANA dari aktor kunci (penting, berpengaruh) sampai aktor yang dianggap kurang berkontribusi kepada pengembangan kawasan. Melalui bantuan aplikasi [aplikasi ISM](#), secara langsung didapatkan pemeringkatan aktor berdasarkan fungsi peran/ kewenangannya terhadap pengembangan Kawasan REBANA. Hasil analisis menunjukkan bahwa PT BIJB (A1) dan Kementerian Perhubungan (A3) menjadi Aktor kunci pengembangan Kawasan REBANA dan sekitarnya. Sementara aktor yang kurang signifikan berkontribusi terhadap pengembangan kawasan adalah Perbankan (A6), BKPM (A7), Pemkab (A8) dan Asosiasi Travel/ UMKM/ BUMDes (A9). Gubernur telah berperan baik, sebagai mediator/ fasilitator pengembangan antar kawasan

Berikut ini hasil pemeringkatan aktor (actor levelling) secara komputerisasi melalui model ISM yang telah diolah.



Gambar 2. Level Aktor Kepentingan Kawasan Metropolitan Rebana
 Sumber : Hasil Analisis (2023)

Dari hasil gambar 2, Aktor yang perlu dicermati tentu aktor Perbankan (A6), BKPM (A7), Pemkab (A8) dan Asosiasi Travel/ UMKM/ BUMDes (A9) yang masih pasif berinisiatif mengembangkan program-program strategis di level kawasan. Efek dari pasif-nya interaksi dari keempat kelembagaan ini memicu spekulasi lahan dan kendala pemerintah melalui pendelegasian kewenangan pelaksana Kawasan REBANA oleh PT BIJB terkendala pengadaan lahan di sekitar Kawasan.

Strategi Pengembangan Kawasan REBANA

Untuk mengurangi risiko-risiko kegagalan pengembangan kawasan di masa yang akan datang, dikembangkan *roadmap* pengembangan kawasan berbasis kelembagaan. *Roadmap* ini disusun untuk menguatkan komponen peran/ fungsi kewenangan dari sepuluh (10) aktor yang terlibat. *Roadmap* ini juga diolah dari hasil wawancara dan konfirmasi kepada praktisi/ pihak-pihak terkait yang mewakili sepuluh (10) instansi/ kelembagaan terkait.

Tabel 3. *Roadmap* Pengembangan Kawasan Berbasis Kelembagaan

Aktor Teridentifikasi	Indikator Komponen Paling Berpengaruh	Intervensi Program	Prioritas dan Alternatif Lokasi Strategi Kegiatan
BIJB	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan Infrastruktur (Bandara) Mendukung dan Menunjang Optimalisasi Faktor Produksi di sekitar kawasan 	<p>a) Percepatan pembangunan dan penambahan fasilitas logistik kargo serta gudang (penyimpanan barang) menuju pelayanan berbasis IoT/ Smart Logistik</p> <p>b) Percepatan pembangunan asrama haji atau pusat kegiatan manasik haji</p>	<p>Prioritas Lokasi : Kabupaten Majalengka</p> <p>Alternatif : Kabupaten Cirebon (1) Kota Cirebon (2)</p>
Kementerian Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> Regulasi dan Dukungan Kelembagaan 	<p>a) Regulasi pembatasan kapasitas Kargo di Soetta dan dialihkan sepenuhnya dari Bandara Soetta ke Bandara Kertajati</p>	<p>Prioritas Lokasi : Kabupaten Majalengka</p> <p>Alternatif : Kabupaten Cirebon (1) Kota Cirebon (2)</p>
Kementerian Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> Kerjasama dan Akses Pasar Insentif dan Kemudahan Berusaha 	<p>a) Pendirian atau standardasi politeknik/ vokasi tenaga terampil bidang industri mesin, manufaktur dan teknologi pertanian</p> <p>b) Fasilitasi teknologi pascapanen dan fasilitasi ekspor untuk UMKM/ BUMDes</p>	<p>Prioritas Lokasi : Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon</p> <p>Alternatif : Kota Cirebon (2)</p>
Kementerian Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Regulasi dan Dukungan Kelembagaan 	<p>a) Perancangan kalender wisata dengan arah wisata jasa, dan wisata ziarah/ tradisi mancanegara atau nasional</p> <p>b) Integrasi pelayanan desa-desa wisata melalui paket desa wisata</p>	<p>Prioritas Lokasi : Kabupaten Cirebon</p> <p>Alternatif : Kabupaten Majalengka (1) Kota Cirebon (2)</p>
Gubernur	<ul style="list-style-type: none"> Insentif dan Kemudahan Berusaha Pertimbangan IPM dan ekonomi wilayah 	<p>a) Regulasi kepastian kepada investor untuk mendapatkan lahan yang <i>clear & clean</i></p> <p>b) Audit capaian kinerja, lulusan dan kurikulum SMA/ SMK di wilayah Kawasan Metropolitan</p>	<p>Prioritas Lokasi : Kabupaten Majalengka,</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Limitasi faktor kualitas lingkungan hidup 	<p>Rebana dan Kertajati <i>Aerocitiy</i></p> <p>c) BLK Plus (Penyempurnaan layanan <i>upgrading</i> dan reskill kompetensi di balai latihan kerja daerah)</p> <p>d) Pemulihan kawasan bekas tambang di wilayah Utara dan perbaikan tata kelola persampahan di sekitar Kawasan Rebana / Kertajati Aerocities</p>	<p>Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon</p>
<p>PT Angkasa Pura II</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan Infrastruktur (Bandara) Mendukung dan Menunjang • Insentif dan Kemudahan 	<p>a) Kemudahan pelayanan, dan pemberian insentif (diskon/ promo) kepada eksportir dan pelaku ekspedisi logistik/ pesawat kargo</p> <p>b) Pengembangan rute penerbangan dengan variasi moda/ jenis pesawat kecil (ex: pesawat susi air) untuk menjangkau pasar ke bandara-bandara kecil</p> <p>c) Direalisasikannya Bandara Kertajati sebagai Bandara Haji dan Bandara Kargo Internasional</p> <p>d) Akses Promosi produk-produk bagi UMKM lokal agar mampu ekspor</p> <p>e) Penyediaan prasarana <i>sanitary</i> produk pertanian</p>	<p>Prioritas Lokasi : Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon</p>
<p>Perbankan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Insentif dan Kemudahan Berusaha 	<p>a) Fasilitasi (KUR) untuk pelaku pertanian ekspor/ memiliki nilai tambah</p> <p>b) Fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku jasa wisata di sektor kuliner, kriya, <i>fashion</i>, dan seni pertunjukkan</p>	<p>Prioritas Lokasi : Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon</p> <p>Alternatif : Kota Cirebon</p>
<p>BKPM</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama dan Akses Pasar 	<p>a) Optimalisasi kegiatan promosi di luar negeri</p>	

		dengan menawarkan <i>portfolio</i> produk dan skema bisnis di Kawasan <i>Kertajati Aerocities</i> dan / Metropolitan Rebana	Prioritas Lokasi : Kabupaten Majalengka , Kota Cirebon Alternatif : Kabupaten Cirebon (2)
		b) Pendampingan lapangan untuk percepatan NIB (OSS)	
Pemerintah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Pertimbangan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) • Limitasi faktor kualitas lingkungan hidup 	a) Audit capaian kinerja, lulusan dan kurikulum SMA/ SMK di wilayah Kawasan Metropolitan Rebana dan <i>Kertajati Aerocitiy</i> b) Percepatan Pembangunan IPAL Rumah tangga dan Zero <i>Defecation Free</i> c) Penguatan masyarakat tangguh bencana di wilayah REBANA dan <i>Kertajati aerocities</i>	Prioritas Lokasi : Kabupaten Majalengka Alternatif : Kabupaten Cirebon (1) Kota Cirebon (2)
Travel Agency/ Asosiasi UMKM dan BUMDes	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi Faktor Produksi di sekitar kawasan 	a) Pengembangan rute baru (angkutan perdesaan) di dalam atau ke luar area Kawasan b) Peningkatan kualitas dan mutu produksi c) Sosialisasi pemanfaatan kargo untuk <i>distibusi</i> produk antar negara	Prioritas Lokasi : Kabupaten Majalengka, dan Kota Cirebon Alternatif : Kabupaten Cirebon (1)

Sumber : Hasil Analisis (2023)

KESIMPULAN

Pengembangan Kawasan Metropolitan REBANA, sebagai kawasan Metropolitan dengan fungsi perkotaan baru di wilayah Utara Jawa melibatkan lintas aktor pemangku kepentingan sehingga berpotensi pada tumpang tindih kewenangan atau ego sektoral. Untuk mencapai keterpaduan fungsi peran/ kewenangan antar kelembagaan, dikembangkan strategi-strategi pengembangan kawasan dengan lokasi fokus di wilayah (Kabupaten/ Kota) sekitar kawasan Penyangga (khususnya Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka dan Kota Cirebon) yang akan membantu kinerja Gubernur Jawa Barat dan Badan Pengelola Kawasan Metropolitan REBANA / Gubernur.

Melalui *expert judgement*, didapatkan empat puluh lima (45) komponen variabel independen terhadap keberlanjutan pembangunan Kawasan Metropolitan REBANA. Hasil *expert judgement* juga teridentifikasi 10 aktor penting dan berpengaruh terhadap keterwujudan pembangunan Kawasan

REBANA dengan delapan (8) indikator pembangunan kawasan diantaranya a) ketersediaan infrastruktur pendukung dan penunjang, b) Optimalisasi Faktor Produksi di sekitar kawasan, c) Regulasi dan dukungan kelembagaan, d) Kerjasama dan akses pasar (*global supply-chain*), e) Insentif dan kemudahan berusaha, f) Pertimbangan Indeks Pembangunan Manusia, g) Pertimbangan ekonomi wilayah, h) limitasi faktor kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan analisis diagram kuadran Mic Mac *Interpretative Structural Matrix*, semua aktor pembangunan Kawasan REBANA memiliki ketergantungan satu sama lain. Gubernur Jawa Barat memiliki ketergantungan (*dependence*) yang paling tinggi terhadap kehadiran atau peran kelembagaan lain, sementara BIJB merupakan kelembagaan dengan inisiasi paling aktif (*Driving Power*) untuk mengelola keberlanjutan pembangunan kawasan REBANA. Pendelegasian sebagian kewenangan kepada Badan Pengelola Kawasan oleh Gubernur diharapkan dapat mengoptimalkan target pembangunan kawasan REBANA. Sama dengan hasil analisis mic mac, pemeringkatan aktor (*actor levelling*) juga menunjukkan bahwa PT BIJB dan Kementerian Perhubungan (Level 1), Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pariwisata (Level 2), Gubernur (Level 3), PT Angkasa Pura 2 (Level 4), Perbankan, BKPM, Pemkab Majalengka/ Cirebon/Kota Cirebon dan Travel Agency/ Asosiasi UMKM dan BUMDes (Level 5). Level tertinggi adalah level 1, dimana semakin tinggi level aktor tersebut maka akan semakin besar pengaruh dan kontribusi terhadap pengembangan kawasan REBANA.

Untuk menjawab strategi keterpaduan kewenangan yang berbasis lokasi fokus di kawasan studi (Kab. Cirebon-Kota Cirebon-Kab. Majalengka), dikembangkan strategi pengembangan kawasan berbasis kelembagaan. Strategi pengembangan kawasan ini didorong oleh Gubernur dan Badan Pengelola Kawasan REBANA sebagai fasilitator/ mediator program dan *enabler* dengan tetap mengoptimalkan peran aktor kunci (BIJB dan Kemenhub) sebagai aktor kunci penyedia fasilitas/ infrastruktur, dan mendorong partisipasi lebih aktif kepada keempat aktor lain diantaranya yakni Perbankan, BKPM, Pemkab (Majalengka/Kota Cirebon/Kabupaten Cirebon) dan Travel Agency/ Asosiasi UMKM dan BUMDes melalui kolaborasi antar pihak untuk menciptakan penguatan aktivitas yang berfokus pada optimalisasi faktor produksi di sekitar kawasan, penguatan kerjasama dan akses pasar (*global supply-chain*), insentif dan kemudahan berusaha, perbaikan Indeks Pembangunan Manusia daerah, dan penyelesaian masalah terhadap kualitas lingkungan hidup.

REFERENSI

- BIJB. (2018). *Masterplan Kertajati Aerocities*. Jawa Barat: PT BIJB Bandung
- Faisal, M.N. (2015), *A study of inhibitors to transparency in red meat supply chains in Gulf cooperation council (GCC) countries*, *Business Process Management Journal*, Vol. 21, No. 6, pp. 1299-1318.
- Faisal, M.N., and Al-Esmael, B.A. (2014), *Modeling the enablers of organizational commitment*, *Business Process Management Journal*, Vol. 20, No. 1, pp. 25-46.
- Gubernur Jawa Barat. (2021). *Peraturan Gubernur Jawa Barat 84 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kawasan REBANA*. Bandung: Gedung Sate
- ISM. (2023). Perangkat Aplikasi ISM Modelling, diakses melalui https://statistikawanku.shinyapps.io/ism_software/ pada Januari 2023

- Kementrian Setneg RI. (2021). *Perpres 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan REBANA dan Kawasan Jawa Barat Selatan*. DKI Jakarta: Kantor Setneg RI
- Kustiwan, dkk.(2009). *Perencanaan Kota*. ITB: Penerbit ITB
- Marimin (2004), *Pengambilan Keputusan Kreteria Majemuk. Teknik dan Aplikasi*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Sage, A. (1977). *Interpretive Structural Modeling: Methodology for Large-Scale Systems*, McGraw-Hill, New York, NY, pp. 91-164.